

## Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat

Fahrezi<sup>1</sup> Maulana Rifai<sup>2</sup> Gili Argenti<sup>3</sup>

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [rezanarchy11@gmail.com](mailto:rezanarchy11@gmail.com)<sup>1</sup> [maulana.rifai@staff.unsika.ac.id](mailto:maulana.rifai@staff.unsika.ac.id)<sup>2</sup>  
[gili.argenti@fisip.unsika.ac.id](mailto:gili.argenti@fisip.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi perlu didukung oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kepala Bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, 1 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, 5 orang Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Hasil pembahasan dari isi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik, hanya saja dalam implementasi dari kebijakan tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh. Dikarenakan dalam hal anggaran sehingga Dinas Koperasi dan UMKM hanya dapat membantu pengembangan sebagian UMKM dan berfokus pada UMKM yang memiliki produk. Sedangkan dari lingkungan implementasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik dengan segala upaya yang semaksimal mungkin baik dari pelatihan, pengadaan alat produksi, dan surat izin usaha, hanya saja dalam lingkungan implementasi tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pengembangan UMKM, Pelatihan, Bantuan Alat

### Abstract

*One of the important fields in national development is the economic sector. The implementation of national development in the economic sector needs to be supported by the central government together with local governments. The purpose of this study was to determine the extent to which the Dinas Koperasi dan UKM in Karawang Regency to develop Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. The field study was conducted through observation, interviews, documentation, and triangulation with a total of 7 informants determined by purposive sampling technique consisting of 1 Head of Division Head of Micro Business Empowerment Dinas Koperasi dan UKM Karawang Karawang Regency, 1 Head of Development, Strengthening and Protection Section Micro Enterprises Office of Dinas Koperasi dan UKM Karawang Karawang Regency, 5 Micro, Small and Medium Enterprises. The results of the discussion of the contents of the policy of the Department of Cooperatives and UMKM in Karawang Regency are good, it's just that the implementation of the policy to the target has not touched all the perpetrators of UMKM as a whole. Because in terms of budget, Dinas Koperasi dan UKM Karawang Office can only help develop some UKM and focus on UKM that have products. Meanwhile, the implementation environment of Dinas Koperasi dan UKM Karawang Service has been good with all the maximum possible efforts, both from training, procurement of production equipment, and business licenses, it's just that in the implementation environment the target has not touched all UKM actors as a whole.*

**Keywords:** UMKM Development, Training, Tool Donation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi tantangan secara global, seperti tuntutan untuk dapat meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Mengingat Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia maka segala macam tantangan tersebut perlu untuk disikapi dan dihadapi agar nilai jual Usaha Mikro Kecil Menengah dapat meningkat dan dapat bersaing dengan produk-produk asing di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan implementasi yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi khususnya. Secara umum UMKM berperan mewujudkan stabilitas nasional dan khususnya stabilitas ekonomi. Lebih dari itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan dan pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, keberadaan usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Oleh karena itu, usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia.

*World Economic Forum* (2018) menempatkan negara Indonesia berada pada posisi ke-45 dari 140 negara dalam Global Competitiveness Index. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (2018) diketahui bahwa perekonomian Indonesia triwulan I/2018 dibanding dengan triwulan I/2017 (y-on-y) tumbuh 5,06 persen meningkat dibanding dengan periode yang sama pada tahun. Dua hal tersebut menjadi suatu prestasi yang perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui upaya berkelanjutan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dapat terus meningkatkan kemampuan yang kompetitif bagi dunia usaha nasional khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

Melihat bahwa betapa potensialnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk mendorong tumbuh kembang UMKM di daerah. Di Kabupaten Karawang, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang merupakan organisasi sektor publik daerah yang menjadi pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat mengimplementasikan pengembangan UMKM di daerah.

Pengembangan UMKM di daerah akan sangat menunjang perekonomian daerah dan ikut berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di daerah. Seperti halnya pada negara-negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu menurut penulis, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat juga berupaya mengatasi jumlah pengangguran tersebut melalui pengembangan UMKM di kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu menyusun dan melaksanakan kebijakan UMKM di Kabupaten Karawang. Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul "Implementasi

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Bantuan Alat”

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian mengenai Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang ini, metode Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, dalam konteks kasus tentang pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Karawang yang menjadi solusi alternatif dari permasalahan di Jawa Barat hal tersebut menjadi signifikan yang dirasakan pada setiap wilayah di Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah.

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Kemudian, data yang ditemukan dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut akan dianalisis menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Cresswell (2009) dalam Sugiyono (2017:3-4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian proses Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan siapapun yang terlibat dalam bentuk Penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bergaya deskriptif.

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan partisipan, teknik analisis data dan lokasi serta waktu Penelitian. Dengan metode Penelitian kualitatif, peneliti kualitatif berusaha untuk membangun makna tentang suatu fenomena kondisi alamiah berdasarkan pandangan dari para partisipan. Pengambilan data pada Penelitian ini dengan teknik Purposive Sampling dengan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yan sudah dilakukan, penulis menggunakan teknik wawancara sebagai metode penelitian dengan membahas data yang sudah diperoleh dengan menggunakan wawancara yang mendalam dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya yang menurut peneliti menguasai dalam memberikan sumber data mengenai informasi lengkap dan akurat, sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung. Berikut nama nama informan beserta jabatannya:

**Tabel 1. Informan**

No.	Nama	Jabatan
1	AJ	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro
2	LW	Kasie. Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
3	R	Pelaku UMKM
4	I	Pelaku UMKM
5	A	Pelaku UMKM
6	H	Pelaku UMKM
7	I	Pelaku UMKM

Sumber: peneliti, 2021

## Pembahasan

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Bantuan Alat Tepat Guna di Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam buku (Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni; isi kebijakan (*content of policy*) dan, lingkungan implementasi (*context of implementation*).

### 1. Isi Kebijakan

Isi Kebijakan adalah program Untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang, adanya sebuah isi kebijakan. Hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Permasalahan yang mendasari dibentuknya Program ini adalah usaha kecil menengah membutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usaha, Baik dalam bentuk Pelatihan maupun bantuan alat sesuai kebutuhan para pelaku usahanya. Sehingga Para pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengembangkan lebih jauh lagi usaha yang sudah ada.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut: "Dinas Koperasi dan UMKM Karawang dalam hal ini Bidang Pengembangan Usaha Mikro melakukan pengembangan pada UMKM yang membutuhkan Pengembangan dari segi pelatihan maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. Kami juga memfasilitasi perizinan Usaha Seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS secara gratis, namun dalam penganggaran Dinas Koperasi dan UMKM hanya bisa membantu pengembangan sebagian UMKM dan berfokus pada UMKM yang memiliki produk."

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui fasilitas, pelatihan, pemberian perizinan melalui OSS secara gratis. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Leoni Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut: "Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, Perda Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan KUKM, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015."

### 2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan Implementasi adalah karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa dalam hal ini Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut. "Sebagai pelaksana kebijakan bidang PUM sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengembangan UMKM di karawang, melalui program pelatihan dan juga bantuan barang produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dari para pelaku UMKM yang kami harapkan dapat meningkatkan penghasilan mereka."

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, melakukan upaya semaksimal mungkin dengan pengembangan UMKM melalui program pelatihan serta bantuan barang produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari UMKM itu sendiri yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dari UMKM tersebut.



Berbeda dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut. “Kami melaksanakan program sesuai peraturan yang ada, sebagai pelaksana program dari Dinas Koperasi dan UMKM Karawang dalam upaya pengembangan UMKM kami memberikan pelayanan surat izin usaha dan juga mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku UMKM serta kami juga membantu penjualan mereka baik melalui online (sosial media dinas) dan juga kami menyediakan Galeri UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Karawang untuk mendisplay produk-produk para pelaku UKM tersebut.”

Hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang upaya pengembangan UMKM dengan memberikan surat izin usaha mengadakan pelatihan bagi para pelaku UMKM dan membantu untuk pemasaran produk melalui sosial media dan galeri UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pelaku usaha kecil menengah:

1. Pak R (pelaku UMKM). “Menurut wawancara dari pak rangga dia mengatakan bahwa tidak adanya bantuan yang diterima untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah dari pemerintah kabupaten karawang akan tetapi dia mengetahui bahwa ada program pengembangan usaha mikro kecil menengah yang memberikan bantuan untuk pengembangan usaha masyarakat”
2. Pak I (Pelaku UMKM). “Menurut wawancara dari Pak Ihsan dia mengatakan pernah mendapatkan bantuan dari program umkm yang diberikan dengan pengajuan terlebih dahulu dari rt setempat. Adanya program pengembangan usaha mikro kecil menengah yang di jalankan oleh pemerintah itu sangat membantu untuk kemajuan usaha nya dikarenakan dalam situasi pandemi seperti ini terkena dampak dari penjualan yang menurun.”
3. Ibu A dan H (Pelaku UMKM). “Menurut hasil wawancara dengan Beliau tidak menerima bantuan dari pemerintah mereka mendapatkan bantuan dari bank mekar untuk pengembangan usahanya nya ada yang dari bank mekar dan menerima pinjaman untuk modal dari bank BRI dengan KUR untuk modal warung sembakonya.”
4. Bapak A (Pelaku UMKM). “Menurut pak ahmad beliau tidak menerima bantuan dari pemerintah”

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dari lingkungan implementasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik dengan segala upaya yang semaksimal mungkin baik dari pelatihan, pengadaan alat produksi, dan surat izin usaha, hanya saja dalam lingkungan implementasi tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh. Seperti hanya membantu sewajarnya kepada para pelaku UMKM dengan pengawasan yang masih kurang khususnya tentang surat izin usaha UMKM

## DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.